



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VIII**

Jl. MR AA Maramis Kompleks
Bandar Udara Internasional
Sam Ratulangi Manado 95258

Telepon : (0431) 811477
Fax : (0431) 811782

Email : otban_wil.viii@dephub.go.id
: kobuwil8@gmail.com
Home Page : <https://otban8.id>

Nomor : UM.207/03/12/KOBU.VIII-2026 Manado, 11 Agustus 2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rapat Koordinasi Komite Keselamatan
dan Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat

Yth. Periksa Alamat Terlampir

Mendasari :

1. Peraturan Menteri Perhubungan PM 95 Tahun 2021 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil 139 Tentang *Aerodrome*;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR – DJPU 06 Tahun 2026 Tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 139 (*Manual of Standart Part 139*) Vol IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);
3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP. 90 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP. 479 Tahun 2015 Tentang Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara.

Bersama ini dengan hormat disampaikan undangan rapat koordinasi Komite Keselamatan dan Rencana Pelaksanaan Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2026
Meeting ID : 841 6538 0346 (*zoom meeting*)
Password : otban8

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,



Ambar Suryoko
NIP. 19701213 199103 1 002

Tembusan:
Direktur Bandar Udara.

Lampiran Surat Kepala Kantor Otoritas Bandar
Udara Wilayah VIII
Nomor : UM.207/03/12/KOBU.VIII-2026
Tanggal : 11 Agustus 2026

Kepada Yth. :

1. *General Manager* PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Sam Ratulangi – Manado;
2. *General Manager* PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Pattimura – Ambon;
3. Kepala Badan Layanan Umum Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Djalaluddin – Gorontalo;
4. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Naha – Tahuna;
5. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Melonguane – Talaud;
6. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Wahai – Pulau Seram;
7. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Amahai – Pulau Seram;
8. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel Sadsuitubun – Langgur;
9. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Rargwamar Pulau Dobo – Kepulauan Aru;
10. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Namniwel;
11. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Namrole – Pulau Buru;
12. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mathilda Batlayeri – Saumlaki;
13. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat – Pulau Larat;
14. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Jhon Becker – Kisar;
15. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Bandaneira – Pulau Banda;
16. Kepala Kantor Badan Layanan Umum Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Babullah – Ternate;
17. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Buli Maba;
18. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Oesman Sadik – Labuha;
19. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Emalamo – Sanana;
20. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Pitu – Morotai;
21. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Gamar Malamo – Galela;
22. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang – Kao;
23. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Teknis Daerah (UPTD) Mangole – Falabisahaya;
24. Kepala Satuan Pelayanan Bandar Udara Miangas;
25. Kepala Satuan Pelayanan Bandar Udara Bolaang Mongondow;
26. Kepala Satuan Pelayanan Bandar Udara Kuffar – Seram Bagian Timur;
27. Kepala Satuan Pelayanan Bandar Udara Moa – Maluku Tenggara;
28. Kepala Satuan Pelayanan Bandar Udara Gebe – Maluku Utara;
29. Kepala Satuan Pelayanan Bandar Udara Siau;
30. Kepala Satuan Pelayanan Bandar Udara Panua Pohuwato;
31. Kepala Bandara Khusus PT. Nusa Halmahera Minerai Marimoi Kobok;
32. Kepala Bandar Udara Khusus PT. Weda Bay Nickel.

Kepala Kantor,



Ambar Suryoko
NIP. 19701213 199103 1 002



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3505550 - 3505006
(Sentral)

Fax : 3505136 - 3505139
3507144

Nomor : UM.006/478/DJPU/2026 Jakarta, 7 September 2026
Klasifikasi : Segera
Lampiran : -
Hal : Penyesuaian Operasional Penerbangan Menyikapi Dampak Abu Vulkanik terhadap Operasional Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng

Yth.:

1. Para Pimpinan Penyelenggara Bandar Udara;
2. Pimpinan Penyelenggara Navigasi Penerbangan;
3. Para Pimpinan Penyelenggara Badan Usaha Angkutan Udara Niaga;
4. Para Pimpinan Pemegang Perizinan Angkutan Udara Bukan Niaga; dan
5. Para Pimpinan Perusahaan Angkutan Udara Asing.

Dalam rangka memastikan terselenggaranya kegiatan operasional penerbangan yang selamat, aman, nyaman, tertib, dan lancar dengan mempertimbangkan kondisi dampak abu vulkanik serta memperhatikan pembatasan/penutupan Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng perlu dilakukan penyesuaian terhadap kegiatan operasional bandar udara dan pelayanan penerbangan di wilayah Indonesia sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penyelenggara Bandar Udara agar dapat melakukan penyesuaian terhadap jam operasional masing-masing bandar udara serta kesiapan pelayanan bandar udaranya dengan memperhatikan kondisi operasional terkini di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng;
2. Bahwa dalam rangka pelayanan navigasi penerbangan, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan agar melakukan penyesuaian terhadap jam operasional bandar udara dan pelayanan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng serta melakukan publikasi dan/atau penyampaian informasi terkini kondisi operasional bandar udara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa Badan Usaha Angkutan Udara Niaga, Pemegang Perizinan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Perusahaan Angkutan Udara Asing agar dapat melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap rencana dan pelaksanaan penerbangan dengan kondisi operasional bandar udara serta informasi penerbangan yang dipublikasikan oleh Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan; dan
4. Bahwa Para Pimpinan Penyelenggara Bandar Udara, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Badan Usaha Angkutan Udara Niaga, Pemegang Perizinan Angkutan Udara Bukan Niaga, dan Perusahaan Angkutan Udara Asing, dihimbau untuk selalu mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerja sama saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara



Lukman F. Laisa
NIP. 19680306 199303 1 001

Tembusan:

1. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan
2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I s.d. X.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
SMS Center : +62 813-111111-05
contact center : 151

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : *UM. 207/9/16/STS/2026*
Klasifikasi : Biasa
Lampiran :
Hal : Undangan

Jakarta, 4 Juni 2026

Yth. (Daftar terlampir)

Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan nilai spiritual, integritas dan profesionalisme ASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan, kami bermaksud menyelenggarakan kegiatan webinar ceramah rohani dengan tema "Amanah dalam Bekerja : Menjadikan Profesi sebagai Ladang Ibadah", adapun kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara *hybrid*, pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Juni 2026

Waktu : 09.00 WIB s.d selesai

Tempat : Ruang Mataram, Gedung Karya lantai 1

Media : *Zoom Meeting*

ID: 933 5990 2237

Kode sandi: pdti1006

Narasumber : K.H. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym)

Tema : Amanah dalam Bekerja : Menjadikan Profesi sebagai Ladang Ibadah

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon kesediaan Bapak/Ibu yang bekerja di Kantor Pusat untuk dapat hadir secara fisik pada acara dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia
dan Organisasi,



Hananto Prakoso
NIP. 19790521 200012 1 005

Lampiran Surat Kepala Biro SDM dan Organisasi

Nomor : UM.207/9/16/STJ/2026

Tanggal : 4 Juni 2026

1. Kepala Biro Perencanaan;
2. Kepala Biro Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum;
4. Kepala Biro Umum;
5. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
6. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
7. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
8. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi;
9. Kepala Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional;
10. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi;
11. Kepala Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi;
12. Ketua Mahkamah Pelayaran;
13. Sekretaris Komite Nasional Keselamatan Transportasi
14. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
15. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
16. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
17. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
18. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
19. Sekretaris Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda;
20. Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
21. Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi,



Hananto Prakoso
NIP. 19790521 200012 1 005



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
(Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id

Nomor : KP.001/449/SDJ.SDM/2026 Jakarta, 21 Mei 2026
Sifat : **Penting**
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Peningkatan Nilai *Document Management System* di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2026

Yth. **Daftar Nama Terlampir**

Sebagai tindak lanjut dari surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kementerian Perhubungan Nomor: KP.001/2/7/STJ/2026 tanggal 13 Mei 2026 Hal Peningkatan Nilai *Document Management System* di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2026, bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan optimal melalui dukungan layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbasis digital, diperlukan upaya untuk menjamin ketersediaan, keutuhan, kerahasiaan, serta memberikan perlindungan komprehensif terhadap arsip dari risiko kehilangan atau kerusakan akibat kelalaian maupun *force majeure* melalui menu *Document Management System* pada aplikasi MyASN.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna menjaga kelengkapan arsip serta mewujudkan digitalisasi manajemen ASN, kiranya seluruh ASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan segera mengunggah dokumen kepegawaiannya masing-masing melalui platform MyASN dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) dengan prosedur sebagaimana terlampir pada lampiran surat ini.

Selanjutnya, apabila terdapat dokumen yang tidak ditemukan (karena hilang, rusak, musnah, dan/atau penyebab lainnya), setiap pegawai dapat melaporkan melalui pengelola kepegawaian di unit kerja masing-masing dan melakukan rekapitulasi sebagaimana format terlampir untuk disampaikan kepada Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara paling lambat tanggal **22 Mei 2026**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Lampiran I Surat Sesditjen Perhubungan Udara
Nomor : KP.001/449/SDJ.SDM/2026
Tanggal : 21 Mei 2026

Kepada Yth:

1. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
3. Para Kepala Balai di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
4. Para Kepala Kantor UPBU di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
5. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setditjen Perhubungan Udara.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Lampiran II Surat Sesditjen Perhubungan Udara
Nomor : KP.001/449/SDJ.SDM/2026
Tanggal : 21 Mei 2026

DOKUMEN YANG HARUS DIUNGGAH

No.	Dokumen Utama	Dokumen Kondisional
1	Daftar Riwayat Hidup	Riwayat Pindah Instansi
2	D2NIP/ Pertimbangan Teknis NIP	Surat Keputusan Cuti di Luar Tanggungan Negara
3	Surat Keputusan CPNS	Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja
4	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas CPNS	Riwayat Pemberhentian
5	Surat Keputusan PNS	
6	Riwayat Pendidikan	
7	Riwayat Kenaikan Pangkat	
8	Riwayat Jabatan	
9	Riwayat Diklat	

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Lampiran III Surat Sesditjen Perhubungan Udara
Nomor : KP.001/449/SDJ.SDM/2026
Tanggal : 21 Mei 2026

FORMAT REKAPITULASI DOKUMEN TIDAK DITEMUKAN

No	Nama	NIP	Unit Kerja	Jenis Riwayat	Nomor Riwayat Dokumen	Tanggal Riwayat Dokumen	Penyebab Tidak Ditemukan	Ket
1	Hafiz	2000060..	Bagian SDM	D2NIP	123	30/11/2021	Hilang	
2	Dst							

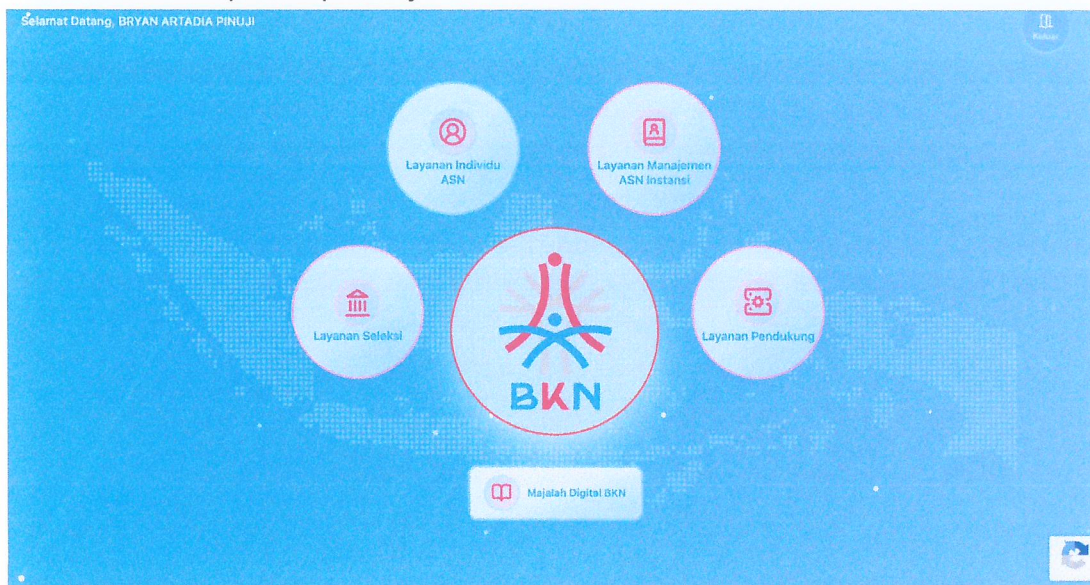
Kepala Unit Kerja

Nama Jelas
NIP.

TATA CARA MENGUNGGAH DOKUMEN

1. Melalui Aplikasi ASN Digital

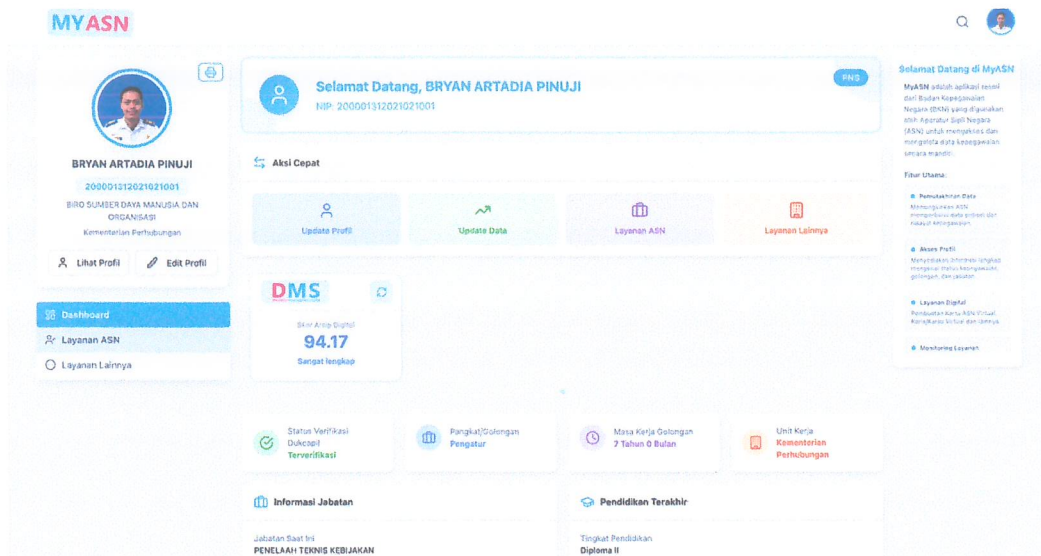
- Setiap ASN membuka tautan ASN digital yaitu <https://asndigital.bkn.go.id/>
- Pilih menu login untuk masuk dalam aplikasi ASN DIGITAL
- Masukan Username dan Password serta Google Authenticator
- Jika tidak bisa login ke ASN digital dimohon untuk dapat menghubungi pengelola kepegawaian di Sekretariat Direktorat Jenderal atau Sekretariat Badan masing-masing
- Setelah masuk aplikasi pilih layanan individu



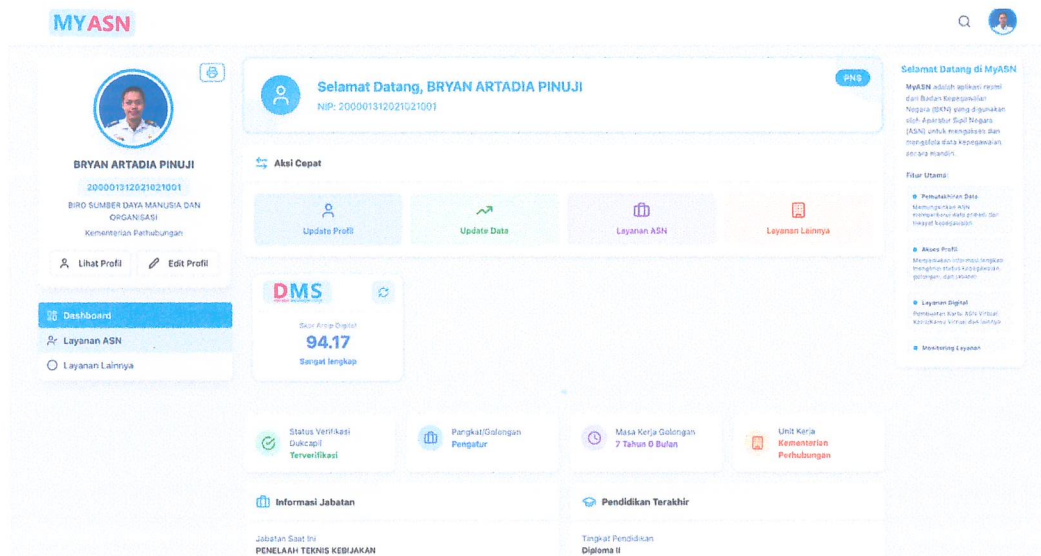
f. Pilih layanan MyASN



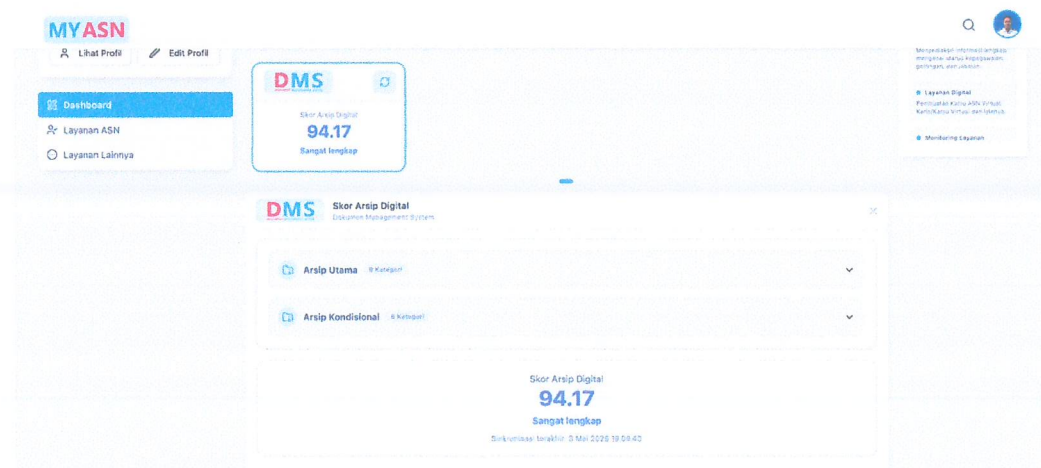
g. Masuk ke menu utama MyASN dengan tampilan sebagai berikut



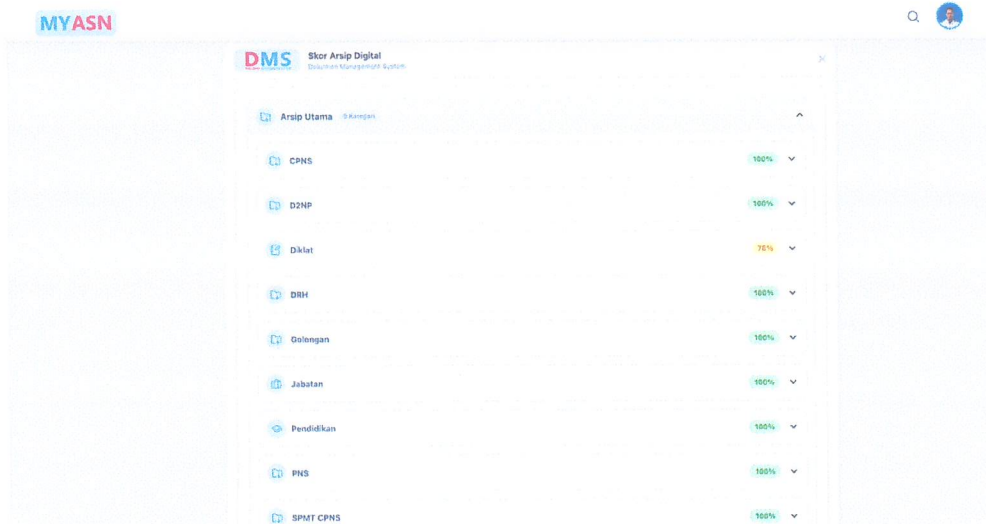
h. Pilih dan *klick* Menu DMS



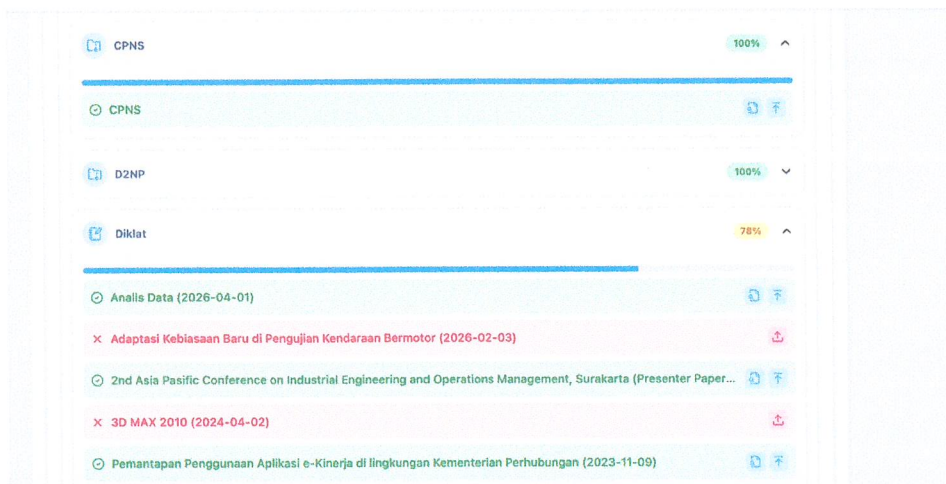
i. Akan muncul 2 kategori arsip yaitu Arsip Utama dan Arsip Kondisional



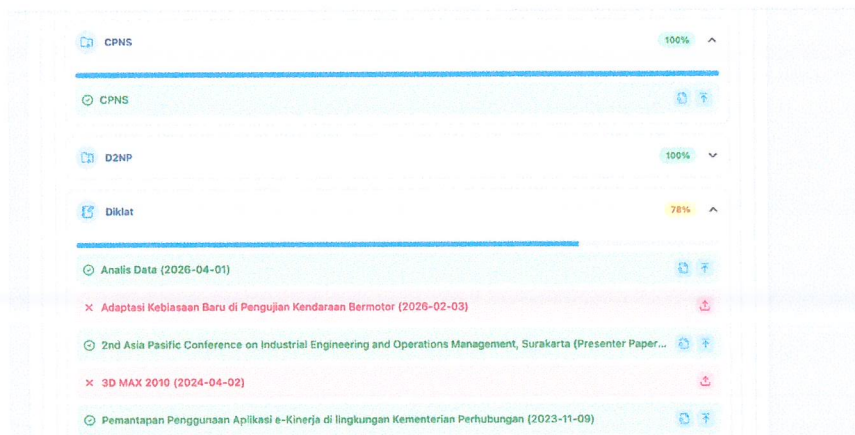
- j. Pilih Arsip Utama dan pilih nilai yang belum 100%



- k. Pilih riwayat yang belum ada dokumenya yaitu riwayat yang berwarna merah atau kuning pada tampilan aplikasi



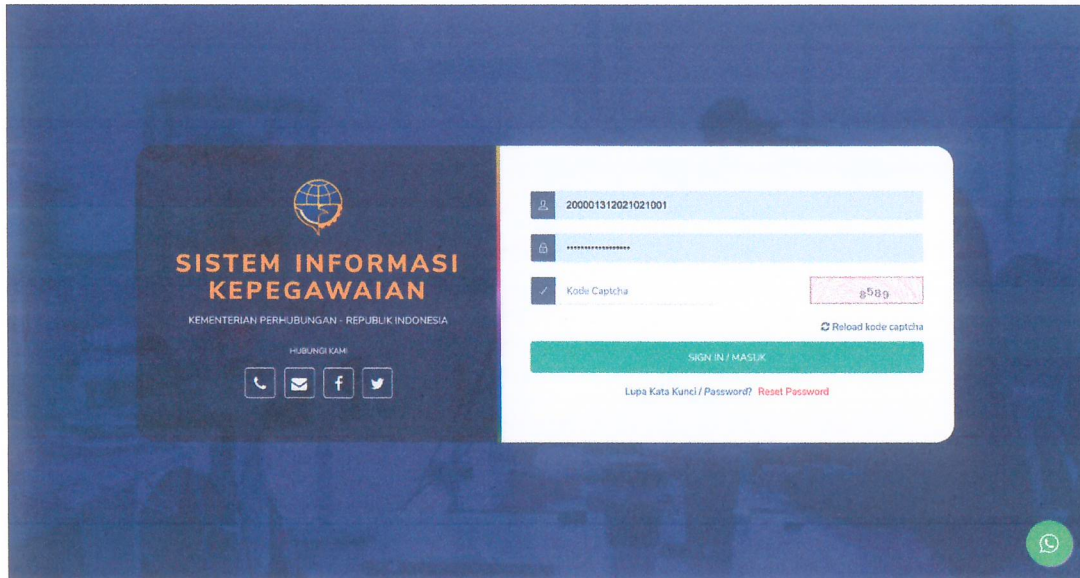
- l. Klik tombol unggah pada riwayat yang belum ada dokumenya



- m. Setelah diunggah dokumennya, dokumen akan di verifikasi oleh pengelola kepegawaian di masing-masing Sekretariat Direktorat Jenderal atau Sekretariat Badan
- n. Lakukan hal yang sama (langkah k dan l) pada menu Arsip Kondisional

TATA CARA PENINGKATAN NILAI DMS

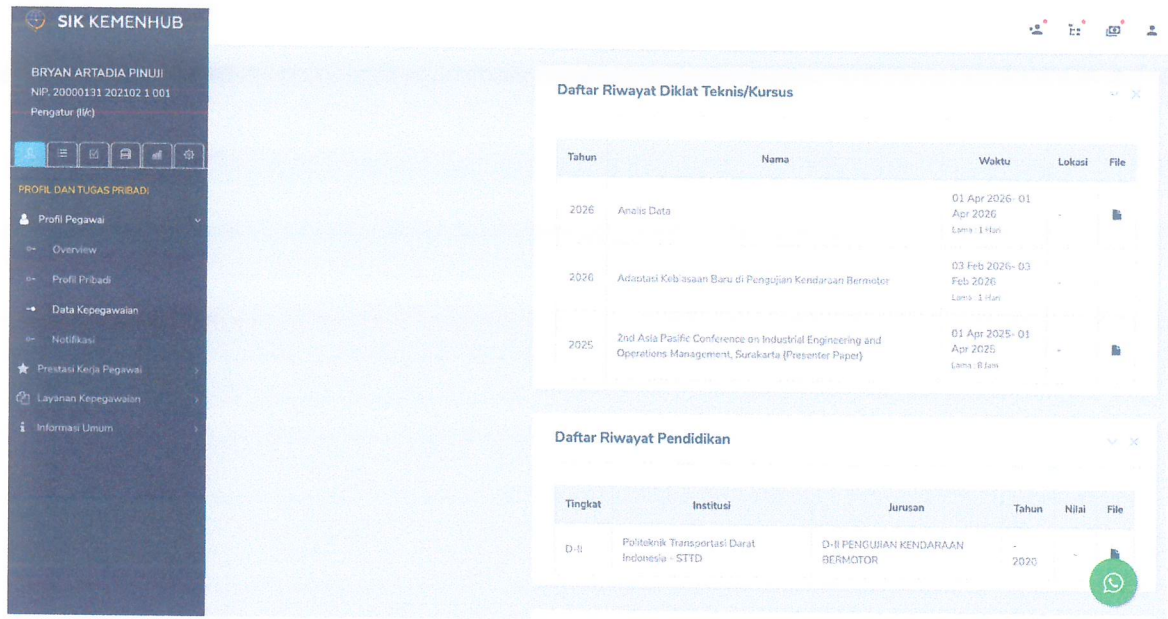
1. Melalui Aplikasi SIK
 - a. Seluruh ASN membuka aplikasi SIK melalui tautan <https://sik.dephub.go.id/>
 - b. Melakukan login pada aplikasi SIK dengan menggunakan username dan password masing-masing dan kode captcha



- c. Jika tidak bisa login ke SIK dimohon untuk dapat menghubungi pengelola kepegawaian di Sekretariat Direktorat, Sekretariat badan masing-masing
 - d. Setelah login pilih menu Data Kepegawaian



- e. Pilih riwayat yang belum ada dokumennya, yaitu riwayat yang belum ada simbol 



SIK KEMENHUB

BRYAN ARTADIA PINUJI
NIP. 20000131 202102 1 001
Pengatur (I/c)

PROFIL DAN TUGAS PRIBADI

- Profil Pegawai
 - Overview
 - Profil Pribadi
 - Data Kepegawaian
 - Notifikasi
- Prestasi Kerja Pegawai
- Layanan Kepegawaian
- Informasi Umum

Daftar Riwayat Diklat Teknis/Kursus

Tahun	Nama	Waktu	Lokasi	File
2026	Analisis Data	01 Apr 2026 - 01 Apr 2026 Lama: 1 Hari	-	
2026	Auditasi Kebiasaan Baru di Pengujian Kendaraan Bermotor	03 Feb 2026 - 03 Feb 2026 Lama: 1 Hari	-	-
2025	2nd Asia Pacific Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Surakarta (Presenter Paper)	01 Apr 2025 - 01 Apr 2025 Lama: 8 Jam	-	

Daftar Riwayat Pendidikan

Tingkat	Institusi	Jurusan	Tahun	Nilai	File
D-II	Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD	D-II PENGEJILAN KENDARAAN BERMOTOR	2020	-	

- f. Jika tidak ada simbol  maka ASN dapat melaporkan dan memberikan file kepada pengelola data kepegawaian di masing-masing Unit Kerja
- g. pengelola data kepegawaian di masing-masing Unit Kerja melakukan pemutakhiran data dengan mengunggah file pada setiap riwayat yang belum ada pada pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing dengan ukuran file maksimal 2mb
- h. Setelah melakukan pemutakhiran data maka setiap riwayat dapat dilakukan integrasi data dari SIK ke SIASN BKN dengan klik tombol  pada setiap riwayat yang telah dilakukan edit/unggah dokumen.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA - 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
SMS Center: +62 813-111111-05

TLX. : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : **IP-106/1/2/SK/2026**
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Undangan Sosialisasi Rangkaian AKIP
Kemenhub Tahun 2026

Jakarta, 11 Agustus 2026

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di seluruh unit kerja di Kementerian Perhubungan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian Perhubungan akan menyelenggarakan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) Kementerian Perhubungan Tahun 2026. Penyelenggaraan anugerah ini merupakan tugas PPID Utama dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dalam AKIP Kemenhub Tahun 2026 tersebut, kualitas layanan informasi publik di masing-masing unit kerja PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan akan dinilai. Unit kerja yang akan dinilai adalah sebanyak 547 unit kerja yang terdiri dari 8 PPID Pelaksana, 36 PPID Pelaksana UPT Ditjen Perhubungan Darat, 296 PPID Pelaksana UPT Ditjen Perhubungan Laut, 169 PPID Pelaksana UPT Ditjen Perhubungan Udara, 11 PPID Pelaksana UPT Ditjen Perkeretaapian, dan 27 PPID Pelaksana UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

Penilaian AKIP dilakukan dengan metode *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ) atau Kuesioner Penilaian Mandiri di *microsite* <http://digitaloffice.kemenhub.go.id/layanan-monev-ppid>. Hasil penilaian berupa kualifikasi yaitu Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, dan Tidak Informatif. Penilaian ini juga akan melibatkan juri eksternal yaitu para pemerhati Keterbukaan Informasi Publik dan Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat. Unit kerja yang mendapatkan nilai "INFORMATIF" akan diberikan Anugerah oleh Menteri Perhubungan selaku Atasan PPID Kementerian Perhubungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Saudara/i untuk dapat mengikuti rangkaian sosialisasi kegiatan AKIP Kemenhub Tahun 2026 sebagai berikut:

1. KELAS PPID : SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Agustus 2026
Pukul : 08.30 WIB - Selesai
Link Zoom : <https://bit.ly/SosialisasiPemutakhirandanPenilaianAKIP2026>
Meeting ID : 990 6739 5847
Password : AKIP2026
Pemapar : Biro Komunikasi dan Informasi Publik

2. Sosialisasi ...

2. SOSIALISASI PENILAIAN AKIP KEMENHUB TAHUN 2026

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2026
Pukul : 08.30 WIB - Selesai
Link Zoom : <https://bit.ly/SosialisasiPemutakhirandanPenilaianAKIP2026>
Meeting ID : 990 6739 5847
Password : AKIP2026
Pembukaan : Sekretaris Jenderal
Pemapar : Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Arif Toha
NIP. 19670320 199203 1 003

Lampiran I Surat Undangan

Sekretaris Jenderal

Nomor : IP.106/1/2/SKJ/2026

Tanggal : 11 Agustus 2026

PPID Pelaksana di Lingkungan Kementerian Perhubungan

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
2. Sesditjen Perhubungan Darat;
3. Sesditjen Perhubungan Laut;
4. Sesditjen Perhubungan Udara;
5. Sesditjen Perkeretaapian;
6. Sesditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda;
7. Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan; dan
8. Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi.

PPID Pelaksana UPT di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat

1. Kepala BPLJSKB;
2. Kepala KSOPP Danau Toba;
3. Kepala BPTD Kelas I Jawa Barat;
4. Kepala BPTD Kelas I Jawa Tengah;
5. Kepala BPTD Kelas II Aceh;
6. Kepala BPTD Kelas II Sumatera Utara;
7. Kepala BPTD Kelas II Sumatera Barat;
8. Kepala BPTD Kelas II Riau;
9. Kepala BPTD Kelas II Kepulauan Riau;
10. Kepala BPTD Kelas II Jambi;
11. Kepala BPTD Kelas II Sumatera Selatan;
12. Kepala BPTD Kelas II Lampung;
13. Kepala BPTD Kelas II Banten;
14. Kepala BPTD Kelas II Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. Kepala BPTD Kelas II Jawa Timur;
16. Kepala BPTD Kelas II Bali;
17. Kepala BPTD Kelas II Nusa Tenggara Barat;
18. Kepala BPTD Kelas II Nusa Tenggara Timur;
19. Kepala BPTD Kelas II Kalimantan Barat;
20. Kepala BPTD Kelas II Kalimantan Selatan;
21. Kepala BPTD Kelas II Kalimantan Tengah;
22. Kepala BPTD Kelas II Kalimantan Timur;
23. Kepala BPTD Kelas II Sulawesi Tenggara;
24. Kepala BPTD Kelas II Sulawesi Selatan;
25. Kepala BPTD Kelas II Sulawesi Tengah;
26. Kepala BPTD Kelas II Gorontalo;
27. Kepala BPTD Kelas II Sulawesi Utara;
28. Kepala BPTD Kelas II Maluku;

29. Kepala BPTD Kelas II Maluku Utara;
30. Kepala BPTD Kelas II Papua;
31. Kepala BPTD Kelas II Papua Barat Daya;
32. Kepala BPTD Kelas III Kalimantan Utara;
33. Kepala BPTD Kelas III Sulawesi Barat;
34. Kepala BPTD Kelas III Bengkulu;
35. Kepala BPTD Kelas III Bangka Belitung; dan
36. Kepala Terminal Tipe A Tirtonadi Jawa Tengah.

PPID Pelaksana UPT di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut

1. Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP);
2. Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP);
3. Kepala KSOP Utama Tanjung Priok;
4. Kepala KSOP Utama Belawan;
5. Kepala KSOP Utama Makassar;
6. Kepala KSOP Utama Tanjung Perak;
7. Kepala KSOP Kelas I Ambon;
8. Kepala KSOP Kelas I Balikpapan;
9. Kepala KSOP Kelas I Banjarmasin;
10. Kepala KSOP Kelas I Banten;
11. Kepala KSOP Kelas I Bitung;
12. Kepala KSOP Kelas I Dumai;
13. Kepala KSOP Kelas I Palembang;
14. Kepala KSOP Kelas I Panjang;
15. Kepala KSOP Kelas I Pontianak;
16. Kepala KSOP Kelas I Samarinda;
17. Kepala KSOP Kelas I Sorong;
18. Kepala KSOP Kelas I Tanjung Emas;
19. Kepala KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun;
20. Kepala KSOP Kelas II Cilacap;
21. Kepala KSOP Kelas II Pekanbaru;
22. Kepala KSOP Kelas II Benoa;
23. Kepala KSOP Kelas II Baubau;
24. Kepala KSOP Kelas II Bontang;
25. Kepala KSOP Kelas II Cirebon;
26. Kepala KSOP Kelas II Gresik;
27. Kepala KSOP Kelas II Jayapura;
28. Kepala KSOP Kelas II Kendari;
29. Kepala KSOP Kelas II Kotabaru – Batulicin;
30. Kepala KSOP Kelas II Marunda;
31. Kepala KSOP Kelas II Patimban;
32. Kepala KSOP Kelas II Tanjung Buton;
33. Kepala KSOP Kelas II Tanjung Pinang;
34. Kepala KSOP Kelas II Tarakan;
35. Kepala KSOP Kelas II Teluk Bayur;
36. Kepala KSOP Kelas II Teluk Palu;

37. Kepala KSOP Kelas II Ternate;
38. Kepala KSOP Kelas III Talang Duku;
39. Kepala KSOP Kelas III Biak;
40. Kepala KSOP Kelas III Gorontalo;
41. Kepala KSOP Kelas III Kijang;
42. Kepala KSOP Kelas III Kuala Tanjung;
43. Kepala KSOP Kelas III Kupang;
44. Kepala KSOP Kelas III Labuan Bajo;
45. Kepala KSOP Kelas III Lembar;
46. Kepala KSOP Kelas III Manado;
47. Kepala KSOP Kelas III Pare-Pare;
48. Kepala KSOP Kelas III Pulau Baai;
49. Kepala KSOP Kelas III Ranga Ilung;
50. Kepala KSOP Kelas III Sampit;
51. Kepala KSOP Kelas III Satui;
52. Kepala KSOP Kelas III Sunda Kelapa;
53. Kepala KSOP Kelas III Tanjung Pakis;
54. Kepala KSOP Kelas III Tanjung Wangi;
55. Kepala KSOP Kelas IV Anggrek;
56. Kepala KSOP Kelas IV Kuala Enok;
57. Kepala KSOP Kelas IV Lhokseumawe;
58. Kepala KSOP Kelas IV Badas;
59. Kepala KSOP Kelas IV Bagansiapiapi;
60. Kepala KSOP Kelas IV Bakauheni;
61. Kepala KSOP Kelas IV Banda Naira;
62. Kepala KSOP Kelas IV Bengkalis;
63. Kepala KSOP Kelas IV Bima;
64. Kepala KSOP Kelas IV Celukan Bawang;
65. Kepala KSOP Kelas IV Ende;
66. Kepala KSOP Kelas IV Fak-Fak;
67. Kepala KSOP Kelas IV Garongkong;
68. Kepala KSOP Kelas IV Gunungsitoli;
69. Kepala KSOP Kelas IV Kumai;
70. Kepala KSOP Kelas IV Kalabahi;
71. Kepala KSOP Kelas IV Kalianget;
72. Kepala KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu;
73. Kepala KSOP Kelas IV Ketapang;
74. Kepala KSOP Kelas IV Kuala Cinaku;
75. Kepala KSOP Kelas IV Kuala Langsa;
76. Kepala KSOP Kelas IV Kuala Tungkal;
77. Kepala KSOP Kelas IV Laurentius Say;
78. Kepala KSOP Kelas IV Malahayati;
79. Kepala KSOP Kelas IV Manokwari;
80. Kepala KSOP Kelas IV Merauke;
81. Kepala KSOP Kelas IV Meulaboh;
82. Kepala KSOP Kelas IV Muara Angke;

83. Kepala KSOP Kelas IV Muara Sabak;
84. Kepala KSOP Kelas IV Muntok;
85. Kepala KSOP Kelas IV Nunukan;
86. Kepala KSOP Kelas IV Padang Bai;
87. Kepala KSOP Kelas IV Panarukan;
88. Kepala KSOP Kelas IV Pangkal Balam;
89. Kepala KSOP Kelas IV Pangkalan Bun;
90. Kepala KSOP Kelas IV Pangkalan Susu;
91. Kepala KSOP Kelas IV Probolinggo;
92. Kepala KSOP Kelas IV Pulang Pisau;
93. Kepala KSOP Kelas IV Sabang;
94. Kepala KSOP Kelas IV Selat Panjang;
95. Kepala KSOP Kelas IV Sibolga;
96. Kepala KSOP Kelas IV Sintete;
97. Kepala KSOP Kelas IV Sukamara;
98. Kepala KSOP Kelas IV Tanjung Balai Asahan;
99. Kepala KSOP Kelas IV Tanjung Pandan;
100. Kepala KSOP Kelas IV Tegal;
101. Kepala KSOP Kelas IV Tembilahan;
102. Kepala KSOP Kelas IV Toli-Toli;
103. Kepala KSOP Kelas IV Waingapu;
104. Kepala KSOP Khusus Batam;
105. Kepala KUPP Kelas I Molawe;
106. Kepala KUPP Kelas I Tobelo;
107. Kepala KUPP Kelas I Sangkulirang;
108. Kepala KUPP Kelas I Tanjung Uban;
109. Kepala KUPP Kelas II Weda;
110. Kepala KUPP Kelas II Amurang;
111. Kepala KUPP Kelas II Babang;
112. Kepala KUPP Kelas II Linau Bintuhan;
113. Kepala KUPP Kelas II Maccini Baji;
114. Kepala KUPP Kelas II Pemenang;
115. Kepala KUPP Kelas II Raja Ampat;
116. Kepala KUPP Kelas II Tana Paser;
117. Kepala KUPP Kelas II Tanjung Silopo;
118. Kepala KUPP Kelas II Wanci;
119. Kepala KUPP Kelas II Bintuni;
120. Kepala KUPP Kelas II Bajoe;
121. Kepala KUPP Kelas II Banggai;
122. Kepala KUPP Kelas II Benete;
123. Kepala KUPP Kelas II Branta;
124. Kepala KUPP Kelas II Bulukumba;
125. Kepala KUPP Kelas II Gilimanuk;
126. Kepala KUPP Kelas II Jepara;
127. Kepala KUPP Kelas II Luwuk;
128. Kepala KUPP Kelas II Larantuka;

129. Kepala KUPP Kelas II Nabire;
130. Kepala KUPP Kelas II Namlea;
131. Kepala KUPP Kelas II Nusa Penida;
132. Kepala KUPP Kelas II Pomako;
133. Kepala KUPP Kelas II Palopo;
134. Kepala KUPP Kelas II Raha;
135. Kepala KUPP Kelas II Reo;
136. Kepala KUPP Kelas II Serui;
137. Kepala KUPP Kelas II Sanana;
138. Kepala KUPP Kelas II Sangatta;
139. Kepala KUPP Kelas II Saumlaki;
140. Kepala KUPP Kelas II Soasio;
141. Kepala KUPP Kelas II Tual;
142. Kepala KUPP Kelas II Tulehu;
143. Kepala KUPP Kelas II Tahuna;
144. Kepala KUPP Kelas II Tanjung Beringin;
145. Kepala KUPP Kelas II Tanjung Redeb;
146. Kepala KUPP Kelas II Tanjung Selor;
147. Kepala KUPP Kelas II Tarempa;
148. Kepala KUPP Kelas III Amahai;
149. Kepala KUPP Kelas III Batahan;
150. Kepala KUPP Kelas III Bula;
151. Kepala KUPP Kelas III Hatu Piru;
152. Kepala KUPP Kelas III Kintap;
153. Kepala KUPP Kelas III Lapuko;
154. Kepala KUPP Kelas III Lewoleba;
155. Kepala KUPP Kelas III Melonguane;
156. Kepala KUPP Kelas III Namrole;
157. Kepala KUPP Kelas III Padang Tikar;
158. Kepala KUPP Kelas III Paloh;
159. Kepala KUPP Kelas III Sadai;
160. Kepala KUPP Kelas III Teluk Segintung;
161. Kepala KUPP Kelas III Teminabuan;
162. Kepala KUPP Kelas III Agats;
163. Kepala KUPP Kelas III Ampana;
164. Kepala KUPP Kelas III Atapupu;
165. Kepala KUPP Kelas III Bade;
166. Kepala KUPP Kelas III Bunta;
167. Kepala KUPP Kelas III Ba'a;
168. Kepala KUPP Kelas III Baranusa;
169. Kepala KUPP Kelas III Barus;
170. Kepala KUPP Kelas III Batang;
171. Kepala KUPP Kelas III Bawean;
172. Kepala KUPP Kelas III Belang-Belang;
173. Kepala KUPP Kelas III Buli;
174. Kepala KUPP Kelas III Bungku;

175. Kepala KUPP Kelas III Calang;
176. Kepala KUPP Kelas III Calabai;
177. Kepala KUPP Kelas III Dobo;
178. Kepala KUPP Kelas III Dabo Singkep;
179. Kepala KUPP Kelas III Daruba;
180. Kepala KUPP Kelas III Geser;
181. Kepala KUPP Kelas III Indramayu;
182. Kepala KUPP Kelas III Jailolo;
183. Kepala KUPP Kelas III Jampea;
184. Kepala KUPP Kelas III Jeneponto;
185. Kepala KUPP Kelas III Juwana;
186. Kepala KUPP Kelas III Kaimana;
187. Kepala KUPP Kelas III Kokas;
188. Kepala KUPP Kelas III Kwandang;
189. Kepala KUPP Kelas III Karangantu;
190. Kepala KUPP Kelas III Karimunjawa;
191. Kepala KUPP Kelas III Kendawangan;
192. Kepala KUPP Kelas III Kolaka;
193. Kepala KUPP Kelas III Kolonedale;
194. Kepala KUPP Kelas III Korido;
195. Kepala KUPP Kelas III Kota Agung;
196. Kepala KUPP Kelas III Kotabunan;
197. Kepala KUPP Kelas III Kuala Gaung;
198. Kepala KUPP Kelas III Kuala Mendahara;
199. Kepala KUPP Kelas III Kuala Semboja;
200. Kepala KUPP Kelas III Leok;
201. Kepala KUPP Kelas III Labuhan;
202. Kepala KUPP Kelas III Labuhan Lombok;
203. Kepala KUPP Kelas III Labuhan Maringgai;
204. Kepala KUPP Kelas III Labuan Uki;
205. Kepala KUPP Kelas III Lahewa;
206. Kepala KUPP Kelas III Laiwui;
207. Kepala KUPP Kelas III Leidong;
208. Kepala KUPP Kelas III Likupang;
209. Kepala KUPP Kelas III Majene;
210. Kepala KUPP Kelas III Mamuju;
211. Kepala KUPP Kelas III Malakoni-Enggano;
212. Kepala KUPP Kelas III Malili;
213. Kepala KUPP Kelas III Manggar;
214. Kepala KUPP Kelas III Marapokot;
215. Kepala KUPP Kelas III Masalembu;
216. Kepala KUPP Kelas III Menggala;
217. Kepala KUPP Kelas III Mesuji;
218. Kepala KUPP Kelas III Muara Siberut;
219. Kepala KUPP Kelas III Nipah Panjang;
220. Kepala KUPP Kelas III Ogoamas;

221. Kepala KUPP Kelas III Oransbari;
222. Kepala KUPP Kelas III Parigi;
223. Kepala KUPP Kelas III Poso;
224. Kepala KUPP Kelas III Pagimana;
225. Kepala KUPP Kelas III Pangandaran;
226. Kepala KUPP Kelas III Panipahan;
227. Kepala KUPP Kelas III Pattiro Bajo;
228. Kepala KUPP Kelas III Pelabuhanratu;
229. Kepala KUPP Kelas III Pomala;
230. Kepala KUPP Kelas III Pulau Bunyu;
231. Kepala KUPP Kelas III Pulau Tello;
232. Kepala KUPP Kelas III Rembang;
233. Kepala KUPP Kelas III Saketa;
234. Kepala KUPP Kelas III Sape;
235. Kepala KUPP Kelas III Sarmi;
236. Kepala KUPP Kelas III Selayar;
237. Kepala KUPP Kelas III Sinjai;
238. Kepala KUPP Kelas III Sapeken;
239. Kepala KUPP Kelas III Sapudi;
240. Kepala KUPP Kelas III Seba;
241. Kepala KUPP Kelas III Senayang;
242. Kepala KUPP Kelas III Sikakap;
243. Kepala KUPP Kelas III Sinabang;
244. Kepala KUPP Kelas III Singkil;
245. Kepala KUPP Kelas III Sirombu;
246. Kepala KUPP Kelas III Siuban;
247. Kepala KUPP Kelas III Siwa;
248. Kepala KUPP Kelas III Sofifi;
249. Kepala KUPP Kelas III Sungai Guntung;
250. Kepala KUPP Kelas III Sungai Lumpur;
251. Kepala KUPP Kelas III Sungai Nyamuk;
252. Kepala KUPP Kelas III Susoh;
253. Kepala KUPP Kelas III Tanjung Medang;
254. Kepala KUPP Kelas III Tanjung Santan;
255. Kepala KUPP Kelas III Tanjung Sarang Elang;
256. Kepala KUPP Kelas III Tapak Tuan;
257. Kepala KUPP Kelas III Telaga Biru;
258. Kepala KUPP Kelas III Teluk Batang;
259. Kepala KUPP Kelas III Teluk Dalam;
260. Kepala KUPP Kelas III Tilamuta;
261. Kepala KUPP Kelas III Ulu Siau;
262. Kepala KUPP Kelas III Waikelo;
263. Kepala KUPP Kelas III Waren;
264. Kepala KUPP Kelas III Wasior;
265. Kepala KUPP Kelas III Wonreli;
266. Kepala KUPP Kelas III Wini;

267. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Ambon;
268. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Belawan;
269. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Dumai;
270. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Bitung;
271. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Palembang;
272. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Sorong;
273. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Samarinda;
274. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak;
275. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Pinang;
276. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Makassar;
277. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Benoa;
278. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Banjarmasin;
279. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Jayapura;
280. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Kupang;
281. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Sabang;
282. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Tanjung Emas;
283. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Teluk Bayur;
284. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Tanjung Intan;
285. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Kendari;
286. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Merauke;
287. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Pontianak;
288. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Sibolga;
289. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Tarakan;
290. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Tual;
291. Kepala Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok;
292. Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I Tanjung Priok;
293. Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Bitung;
294. Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tual;
295. Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Perak; dan
296. Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban.

PPID Pelaksana UPT di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara

1. Kepala Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
2. Kepala Balai Teknik Penerbangan;
3. Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama;
4. Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah II;
5. Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah III;
6. Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah IV;
7. Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah V;
8. Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VI;
9. Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VII;
10. Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII;
11. Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah IX;
12. Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah X;
13. Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan;
14. Kepala Badan Layanan Umum UPBU Kelas I Haluoleo – Kendari;

15. Kepala Badan Layanan Umum UPBU Kelas II Rendani;
16. Kepala Badan Layanan Umum UPBU Mutiara Sis Al-Jufri – Palu;
17. Kepala UPBU Kelas I Utama Juwata – Tarakan;
18. Kepala UPBU Kelas I APT Pranoto – Samarinda;
19. Kepala UPBU Kelas I Budiarto – Curug;
20. Kepala UPBU Kelas I Djalaluddin – Gorontalo;
21. Kepala UPBU Kelas I Domine Eduard Osok – Sorong;
22. Kepala UPBU Kelas I Kalimantan – Berau;
23. Kepala UPBU Kelas I Mopah – Merauke;
24. Kepala UPBU Kelas I Wamena – Jayawijaya;
25. Kepala UPBU Kelas II Binaka – Gunung Sitoli;
26. Kepala UPBU Kelas II Cut Nyak Dhien – Nagan Raya;
27. Kepala UPBU Kelas II Douw Aturere – Nabire;
28. Kepala UPBU Kelas II Fransiskus Xaverius Seda – Maumer;
29. Kepala UPBU Kelas II Gusti Sjamsir Alam – Kotabaru;
30. Kepala UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman;
31. Kepala UPBU Kelas II H. Asan – Sampit;
32. Kepala UPBU Kelas II Iskandar – Pangkalan Bun;
33. Kepala UPBU Kelas II Karel Sadsuitubun – Maluku Tenggara;
34. Kepala UPBU Kelas II Kasiguncu – Poso;
35. Kepala UPBU Kelas II Komodo – Labuan Bajo;
36. Kepala UPBU Kelas II Lede Kalumbang – Tambolaka;
37. Kepala UPBU Kelas II Mozes Kilangin Timika;
38. Kepala UPBU Kelas II Nop Goliat – Dekai;
39. Kepala UPBU Kelas II Pangsuma – Putussibau;
40. Kepala UPBU Kelas II Rahadi Oesman – Ketapang;
41. Kepala UPBU Kelas II Sultan Babullah – Ternate;
42. Kepala UPBU Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin – Bima;
43. Kepala UPBU Kelas II Syukuran Aminuddin Amir – Luwuk;
44. Kepala UPBU Kelas II Tampa Padang – Mamuju;
45. Kepala UPBU Kelas II Tebelian – Sintang;
46. Kepala UPBU Kelas II Uumbu Meheng Kunda – Waingapu;
47. Kepala UPBU Kelas III A. A. Bere Tallo – Atambua;
48. Kepala UPBU Kelas III Aek Godang;
49. Kepala UPBU Kelas III Akimuga – Mimika;
50. Kepala UPBU Kelas III Amahai – Pulau Seram;
51. Kepala UPBU Kelas III Andi Jemma – Masamba;
52. Kepala UPBU Kelas III Arung Palakka – Bone;
53. Kepala UPBU Kelas III Ayawasi;
54. Kepala UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni;
55. Kepala UPBU Kelas III Bade;
56. Kepala UPBU Kelas III Bandaneira;
57. Kepala UPBU Kelas III Batom – Pegunungan Bintang;
58. Kepala UPBU Kelas III Haji Muhammad Sidik – Muara Teweh;
59. Kepala UPBU Kelas III Betoambari – Bau Bau;
60. Kepala UPBU Kelas III Bilorai – Intan Jaya;

61. Kepala UPBU Kelas III Bintuni – Teluk Bintuni;
62. Kepala UPBU Kelas III Bokondini – Tolikara;
63. Kepala UPBU Kelas III Bomakia – Boven Digoel;
64. Kepala UPBU Kelas III Buli – Maba;
65. Kepala UPBU Kelas III Cakrabhuwana – Cirebon;
66. Kepala UPBU Kelas III Dabra;
67. Kepala UPBU Kelas III Dabo – Singkep;
68. Kepala UPBU Kelas III Datah Dawai – Mahakam Ulu;
69. Kepala UPBU Kelas III D.C. Saudale – Rote;
70. Kepala UPBU Kelas III Depati Parbo – Kerinci;
71. Kepala UPBU Kelas III Dewadaru Karimunjawa;
72. Kepala UPBU Kelas III Dr. Ferdinand Lumbantobing – Tapanuli Tengah;
73. Kepala UPBU Kelas III Dobo – Kepulauan Aru;
74. Kepala UPBU Kelas III Elelim – Yalimo;
75. Kepala UPBU Kelas III Emalamo – Sanana;
76. Kepala UPBU Kelas III Enarotali – Distrik Paniai Timur;
77. Kepala UPBU Kelas III Ewer – Asmat;
78. Kepala UPBU Kelas III Frans Sales Lega – Ruteng;
79. Kepala UPBU Kelas III Gamar Malamo – Galela;
80. Kepala UPBU Kelas III Gewayantana – Larantuka;
81. Kepala UPBU Kelas III Gusti Sjamsir Alam – Kotabaru;
82. Kepala UPBU Kelas III H. Aroeppala – Selayar;
83. Kepala UPBU Kelas III Harun Thohir – Gresik;
84. Kepala UPBU Kelas III Ilaga – Puncak Jaya;
85. Kepala UPBU Kelas III Illu;
86. Kepala UPBU Kelas III Inanwatan – Sorong Selatan;
87. Kepala UPBU Kelas III Japura – Rengat;
88. Kepala UPBU Kelas III John Becker – Kisar;
89. Kepala UPBU Kelas III Kambuaya – Maybrat;
90. Kepala UPBU Kelas III Kamur – Asmat;
91. Kepala UPBU Kelas III Karubaga, Tolikara;
92. Kepala UPBU Kelas III Kebar – Tambrau;
93. Kepala UPBU Kelas III Kepi – Mappi;
94. Kepala UPBU Kelas III Kimaam – Merauke;
95. Kepala UPBU Kelas III Kiwiok – Pegunungan Bintang;
96. Kepala UPBU Kelas III Kuabang – Kao;
97. Kepala UPBU Kelas III Kuala Kurun;
98. Kepala UPBU Kelas III Kuala Pembuang;
99. Kepala UPBU Kelas III Kokonao;
100. Kepala UPBU Kelas III Kolonel Robert Atty Bessing – Malinau;
101. Kepala UPBU Kelas III Lagaligo – Bua;
102. Kepala UPBU Kelas III Larat – Kepulauan Tanimbar;
103. Kepala UPBU Kelas III Lasikin;
104. Kepala UPBU Kelas III Lasondre – Pulau Batu;
105. Kepala UPBU Kelas III Long Apung;
106. Kepala UPBU Kelas III Maimun Saleh – Sabang;

107. Kepala UPBU Kelas III Mali – Alor;
108. Kepala UPBU Kelas III Malikussaleh – Aceh Utara;
109. Kepala UPBU Kelas III Mararena – Sarmi;
110. Kepala UPBU Kelas III Maratua – Berau;
111. Kepala UPBU Kelas III Marinda – Waisai Raja Ampat;
112. Kepala UPBU Kelas III Matahora – Wakatobi;
113. Kepala UPBU Kelas III Mathilda Batlayeri – Saumlaki;
114. Kepala UPBU Kelas III Melalan – Melak;
115. Kepala UPBU Kelas III Melonguane;
116. Kepala UPBU Kelas III Merdey – Teluk Bintuni;
117. Kepala UPBU Kelas III Mindiptanah – Boven Digoel;
118. Kepala UPBU Kelas III Moanamani;
119. Kepala UPBU Kelas III Morowali;
120. Kepala UPBU Kelas III Muara Bungo;
121. Kepala UPBU Kelas III Mukomuko;
122. Kepala UPBU Kelas III Mulia – Puncak Jaya;
123. Kepala UPBU Kelas III Naha – Tahuna;
124. Kepala UPBU Kelas III Namniwel – Namlea;
125. Kepala UPBU Kelas III Namrole;
126. Kepala UPBU Kelas III Nanga Pinoh;
127. Kepala UPBU Kelas III Numfor;
128. Kepala UPBU Kelas III Nunukan;
129. Kepala UPBU Kelas III Oesman Sadik – Labuha;
130. Kepala UPBU Kelas III Okaba – Merauke;
131. Kepala UPBU Kelas III Oksibil;
132. Kepala UPBU Kelas III Pogogul – Buol;
133. Kepala UPBU Kelas III Pitu – Morotai;
134. Kepala UPBU Kelas III Toraja;
135. Kepala UPBU Kelas III Raja Haji Abdullah – Tanjung Balai Karimun;
136. Kepala UPBU Kelas III Rampi – Luwu Utara;
137. Kepala UPBU Kelas III Ranai – Natuna;
138. Kepala UPBU Kelas III Rembele – Takengon;
139. Kepala UPBU Kelas III Sangia Nibandera – Kolaka;
140. Kepala UPBU Kelas III Sanggu;
141. Kepala UPBU Kelas III Seko – Luwu Utara;
142. Kepala UPBU Kelas III Senggeh – Keerom Papua;
143. Kepala UPBU Kelas III Silampari – Lubuklinggau;
144. Kepala UPBU Kelas III Soa – Bajawa;
145. Kepala UPBU Kelas III Stevanus Rumbewas Serui;
146. Kepala UPBU Kelas III Sugimanuru – Muna Barat;
147. Kepala UPBU Kelas III Sultan Bantilan -Tolitoli;
148. Kepala UPBU Kelas III Sultan Muhammad Kaharudin – Sumbawa;
149. Kepala UPBU Kelas III Tanah Merah – Boven Digoel;
150. Kepala UPBU Kelas III Tanjung Api Ampana – Tojo Una Una;
151. Kepala UPBU Kelas III Tanjung Harapan – Tanjung Selor;
152. Kepala UPBU Kelas III Tardamu – Sabu;

153. Kepala UPBU Kelas III Teminabuan – Sorong Selatan;
154. Kepala UPBU Kelas III Teuku Cut Ali – Tapak Tuan;
155. Kepala UPBU Kelas III Tiom;
156. Kepala UPBU Kelas III Siboru – Fakfak;
157. Kepala UPBU Kelas III Trunojoyo – Sumenep;
158. Kepala UPBU kelas III Tuanku Tambusai - Pasir Pangaraian;
159. Kepala UPBU Kelas III Tumbang Samba;
160. Kepala UPBU Kelas III Tunggul Wulung – Cilacap;
161. Kepala UPBU Kelas III Utarom – Kaimana;
162. Kepala UPBU Kelas III Wahai – Maluku Tengah;
163. Kepala UPBU Kelas III Waghete – Deiyai;
164. Kepala UPBU Kelas III Wasior;
165. Kepala UPBU Kelas III Wunopito – Lewoleba;
166. Kepala UPBU Kelas III Yuwai Semaring – Long Bawan;
167. Kepala UPBU Kelas III Mentawai;
168. Kepala UPBU Kelas III Letung – Anambas; dan
169. Kepala UPBU Khusus Ibu Kota Nusantara (IKN).

PPID Pelaksana UPT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian

1. Kepala Balai Teknik Perketaapian Kelas I Jakarta;
2. Kepala Balai Teknik Perketaapian Kelas I Bandung;
3. Kepala Balai Teknik Perketaapian Kelas I Semarang;
4. Kepala Balai Teknik Perketaapian Kelas I Surabaya;
5. Kepala Balai Teknik Perketaapian Kelas I Medan;
6. Kepala Balai Teknik Perketaapian Kelas II Padang;
7. Kepala Balai Teknik Perketaapian Kelas II Palembang;
8. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
9. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
10. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan; dan
11. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

PPID Pelaksana UPT di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan

1. Direktur STIP Jakarta;
2. Direktur PTDI-STTD Bekasi;
3. Direktur PPI-Curug;
4. Direktur BP3IP Jakarta;
5. Direktur PIP Semarang;
6. Direktur PIP Makassar;
7. Direktur PKTJ Tegal;
8. Direktur PPI Madiun;
9. Direktur Poltekpel Surabaya;
10. Direktur Poltekpel Sumatera Barat;
11. Direktur Poltekbang Surabaya;

12. Direktur Poltekbang Makassar;
13. Direktur Poltekbang Medan;
14. Direktur Poltekbang Palembang;
15. Direktur Poltekel Banten;
16. Direktur Poltekel Barombong;
17. Direktur Poltekel Sorong;
18. Direktur Poltekel Malahayati Aceh;
19. Direktur Poltekel Sulawesi Utara;
20. Direktur Politeknik Transportasi SDP Palembang;
21. Direktur Poltekbang Jayapura;
22. Direktur Akademi Penerbangan Indonesia (API) Banyuwangi;
23. Direktur Politeknik Transportasi Darat Bali;
24. Direktur BP2TD Mempawah;
25. Direktur BP2TL Jakarta;
26. Direktur BP3 Curug; dan
27. Direktur BP3K SDMT Ciwidey.

Sekretaris Jenderal,



Arif Toha

NIP. 19670320 199203 1 003

Lampiran II Surat Undangan

Sekretaris Jenderal

Nomor : IP.106/1/2/SK/2026

Tanggal : 11 Agustus 2026

KONTAK NARAHUBUNG AKIP KEMENHUB TAHUN 2026

NO.	SUB SEKTOR	NARAHUBUNG
1.	• Sekretariat Inspektorat Jenderal • Setditjen Perhubungan Darat • Setditjen Perhubungan Laut • Setditjen Perhubungan Udara • Setditjen Perkeretaapian • Setditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda • Setbadan Kebijakan Transportasi • Setbadan Pengembangan SDM Perhubungan	Raya – 081283982994
2.	UPT Ditjen Perhubungan Darat	Eva – 083875806573 Tika – 081279086561
3.	UPT Ditjen Perhubungan Laut	Fauzi – 081949697049 Novita – 085643904455
4.	UPT Ditjen Perhubungan Udara	Eva - 083875806573 Tika – 081279086561
5.	UPT Ditjen Perkeretaapian	Raya – 081283982994
6.	UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan	Raya – 081283982994

Lampiran III Surat Undangan

Sekretaris Jenderal

Nomor : 18.106/1/2/SKJ/2026

Tanggal : 11 Agustus 2026

Susunan Acara Kelas PPID : Sosialisasi Pemutakhiran Informasi Publik Tahun 2026

NO.	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	08.30 – 08.35 WIB	Pembukaan	MC
2.	08.35 – 08.45 WIB	Sambutan Pembukaan	Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
3.	08.45 – 09.30 WIB	Pemaparan Materi terkait Pemutakhiran Informasi Publik	Kepala Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi
4.	09.30 – 09.55 WIB	Sesi Tanya Jawab	Seluruh Peserta
5.	09.55 – 10.00 WIB	Penutupan	MC

Susunan Acara Sosialisasi Penilaian AKIP Kemenhub Tahun 2026

NO.	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	08.30 – 08.35 WIB	Pembukaan	MC
	08.35 – 08.40 WIB	Laporan Kegiatan	Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
2.	08.40 – 08.50 WIB	Sambutan Pembukaan	Sekretaris Jenderal
3.	08.50 – 09.30 WIB	Pemaparan Materi terkait Sosialisasi AKIP Kemenhub Tahun 2026	Kepala Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi
4.	09.30 – 09.55 WIB	Sesi Tanya Jawab	Seluruh Peserta
5.	09.55 – 10.00 WIB	Penutupan	MC